



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN 2007 NOMOR 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

Menimbang:

- a. Bahwa untum mempercepat pemberian layanan masyarakat khususnya dalam wilayah kecamatan Baras tepat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka dipandang perlu membantuk memekarkan kecamatan Baras menjadi kecamatan baru.
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan, ditegaskan untuk Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU  
UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang ada dalam Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Mamuju Utara;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN IBUKOTA**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 7 (tujuh) Kecamatan hasil pemekaran kecamatan induk di dalam Kabupaten Mamuju Utara ;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keseluruhan terdiri dari :
  1. Kecamatan Sarudu dimekarkan menjadi :
    - a. Kecamatan Sarudu (kecamatan induk);
    - b. Kecamatan Dapurang; dan
    - c. Kecamatan Duripoku
  2. Kecamatan Baras dimekarkan menjadi :
    - a. Kecamatan Baras (kecamatan induk); dan
    - b. Kecamatan Bulu Taba;
  3. Kecamatan Pasangkayu dimekarkan menjadi ;
    - a. Kecamatan Pasangkayu (kecamatan induk);
    - b. Kecamatan Tikke Raya; dan
    - c. Kecamatan Pedongga;
  4. Kecamatan Bambalamotu dimekarkan menjadi :
    - a. Kecamatan Bambalamotu;
    - b. Kecamatan Bambaira; dan
    - c. Kecamatan Sarjo;
- (3) Kecamatan yang dimaksud pada ayat (3) mempunyai luas wilayah, batas wilayah, bagian wilayah kerja dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**Pasal 3**

Kecamatan induk dan kecamatan hasil pemekaran mempunyai ibukota masing- masing adalah sebagai berikut:

- a. Ibu kota Kecamatan Sarudu berkedudukan di Desa Sarudu;
- b. Ibu kota Kecamatan Dapurang berkedudukan di Desa Dapurang
- c. Ibu kota Kecamatan Duripoku berkedudukan di Desa Tamarunang;
- d. Ibu kota Kecamatan Baras berkedudukan di Desa Baras;
- e. Ibu kota Kecamatan Pasangkayu berkedudukan di Kelurahan Pasangkayu;
- f. Ibu kota Kecamatan Bulu Taba berkedudukan di Desa Lilimori;
- g. Ibu kota Kecamatan Tikke Raya berkedudukan di Desa Tikke;

- h. Ibu kota Kecamatan Pedongga berkedudukan di Desa Malei;
- i. Ibu kota Kecamatan Bambalamotu berkedudukan di Desa Randomayang;
- j. Ibu kota Kecamatan Bambaira berkedudukan di Desa Bambaira; dan
- k. Ibu kota Kecamatan Sarjo berkedudukan di Desa Sarjo;

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 4**

Kecamatan induk berkewajiban mempersiapkan sarana dan prasarana kecamatan hasil pemekaran;

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di :Pasangkayu  
padatanggal:31Desember 2007  
**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**TTD**

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
PadaTanggal31Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**

**NUR ALAM TAHIR**

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007 Nomor 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**TTD**

**MULYADI, SH**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**I. UMUM**

Pembentukan kecamatan induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah dibentuk 4 (empat) Kecamatan yang sampai saat ini belum dapat melaksanakan fungsi pemerintahan, pembagunan dan pelayanan masyarakat secara maksimal dan kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah sampai saat ini belum diatur dalam peraturan daerah, sehingga kecamatan yang telah ada perlu dimekarkan dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Bahwa pembentukan kecamatan dengan cara pemekaran dan pemecahan wilayah kerja dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Kecamatan induk adalah kecamatan yang dibentuk sejak terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003;

Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas

LAMPIRAN 1 PERDA KABUPATEN MAMUJU UTARA

Nomor 9 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

**DAFTAR KECAMATAN HASIL PEMEKARAN**

NO	PEMEKARAN KECAMATAN		LUAS (KM <sup>2</sup> )	WILAYAH KERJA (DESA/KEL)	BATAS-BATAS
	KEC. INDUK	KEC. PEMEKARAN			
1	2	3	4	9	10
1	Sarudu	Dapurang  Duripoku	355,21  293,843	Desa Dapurang Desa Benggau Desa Tirtabuana Desa Bulu Bonggu Desa Sarasa  Desa Tammarunang Desa Saptanajaya Desa Taranggi Desa Sipakainga	Utara: Desa Bulu Parigi Kec. Baras Timur : Donggala Barat : Selat Makassar Kec. Karossa Kab. Selatan: Mamuju  Utara : Kec. Baras Kab. Luwu Utara Sul-sel Timur : Barat : Kec. Sarudu Selatan : Kec. Dapurang
2	Baras	Bulu Taba	345,221	Desa Lilimori Desa Karave Desa Bukit Harapan Desa Kastabuana Desa Sumber Sari Desa Lelejae Desa Ompi	Utara : sungai Lariang Desa Lilimori Desa Lelejae dan Desa Sumber Sari Barat : Selat Makassar Selatan : Desa Lambara
3	Pasangkayu	Tikke Raya	216,44	Kelurahan Tikke Desa Makmur Jaya Desa Lariang Desa Pajalele Desa Jengeng Raya	Utara : Desa Martasari Kec. Pedongga Timur : Desa Pelanto Jaya dan Desa Tabiora Kec. Rio Pakawa Barat : selat Makassar Selatan : Sungai Lariang
		Pedongga	210,01	Desa Malei Desa Pedanda Desa Batu Oge Desa Martasari	Utara: Desa Karya Bersama Timur : Desa Lalundu 4 Barat : Selat Makassar Selatan
4	bambalamotu	Bambaira	141,21	Desa Bambaira Desa Kasoloang Desa Tempaure Desa Kaluku Nangka	Utara : Desa Manopu Kec. Sarjo Timur : Kab. Donggala Sulteng Barat : Selat Makassar desa Randomayang Selatan : Kec. Bambalamotu

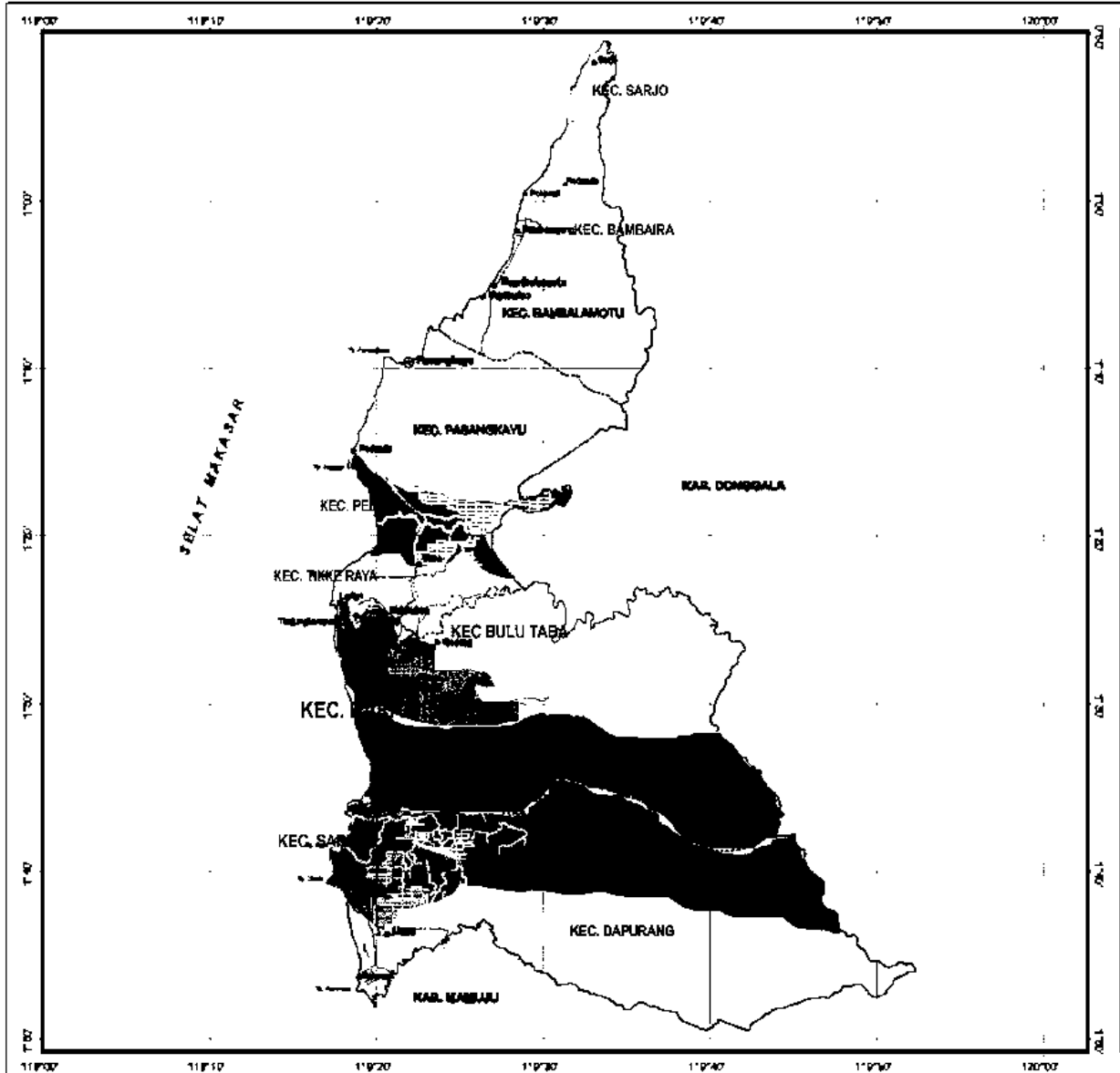
**BUPATI MAMUJU UTARA**

**TTD**

**H. ABDULLAH RASYID**

LAMPIRAN PERDA KAB. MAMUJU UTARA

NOMOR 9 Tahun 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA



**BUPATI MAMUJU UTARA  
TTD  
H. ABDULLAH RASYID**